



Available online at journal.unhas.ac.id/index.php/HJS

HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)

Volume 4, Issue 2, 2022

P-ISSN: 2685-5348, E-ISSN: 2685-4333

Mengapa Masyarakat Indonesia Lemah dalam Menghadapi Ancaman Bencana

(Why Indonesian people are weak to face the threat of disaster)

Nindya Andwitasari¹, Baiq Lily Handayani^{2}*

¹Jurusan Sosiologi Universitas Jember, Indonesia, Email: nindyaandwitasari@gmail.com

²Jurusan Sosiologi Universitas Jember, Indonesia, Email: baiq.fisip@unej.ac.id

* Penulis korespondensi: nindyaandwitasari@gmail.com; baiq.fisip@unej.ac.id

ARTICLE INFO

How to Cite:

Andwitasari, N., & Handayani, B. L. (2022). Mengapa Masyarakat Indonesia Lemah dalam Menghadapi Ancaman Bencana. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 4(2), 150-162.

Keywords:

Indonesia, disaster, society, factors

Kata Kunci :

Indonesia, bencana, masyarakat, faktor

ABSTRACT

Indonesia as a country that has abundant wealth and natural beauty becomes its own attraction and pride for its people. This is due to its unique and strategic geographical location, but behind it all levels of natural disasters are also relatively high, the number of natural disasters that occur has an impact on the structure of society in the face of disaster threats. Indonesian people themselves are still found to be unable to deal with natural disasters, as for the factors underlying this. This study tries to answer what factors are underlying it, the methodology used is through previous literature studies. The main factors that are the basis of these are such as the many myths or ancestral advice that are still closely held by the community in dealing with the threat of natural disasters, the role of government in overcome the threat of natural disasters, the level of literacy, and ambitions that arise due to the progress of the times. As for the advice that should be taken in the handling of the case, which the researchers try to explain in this description.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan dan keindahan alam yang melimpah menjadi daya tarik dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Hal ini disebabkan letak geografis yang unik dan strategis, namun dibalik itu semua tingkat terjadinya bencana alam juga tergolong tinggi, banyaknya bencana alam yang terjadi berdampak pada struktur masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Masyarakat Indonesia sendiri masih banyak ditemukan ketidak siapan dalam menghadapi bencana alam, adapun faktor-faktor yang mendasari hal tersebut. Penelitian ini mencoba menjawab faktor apa saja yang mendasari hal tersebut, metodologi yang digunakan ialah melalui studi literatur terdahulu. Faktor-faktor yang menjadi dasar utama tersebut ialah seperti banyaknya mitos atau nasehat leluhur yang masih dipegang erat oleh masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam, peran pemerintah dalam menangani

* Nindya Andwitasari. Telp.: -

E-mail address: nindyaandwitasari@gmail.com

ancaman bencana alam, tingkat literasi, serta ambisi-ambisi yang timbul sebab kemajuan zaman. Adapun saran yang seharusnya diambil dalam penanganan kasus tersebut, yang coba peneliti jelaskan dalam uraian ini.

1. PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan memiliki posisi geografis sangat unik dan bernilai strategis yang diapit oleh dua samudera yakni samudera Hindia dan samudera Pasifik, juga diapit dua benua besar yakni benua Australia dan benua Asia, serta diwarnai oleh musim hujan dan musim kemarau sebagai ciri khas iklim tropis sebab dilintasi garis Khatulistiwa, menjadikannya memiliki kekayaan dan keindahan alam yang melimpah. Namun dibalik keindahan tersebut, tingkat terjadinya bencana alam juga sangat tinggi. Salah satu penyebab terjadinya bencana alam ini ialah letak geologis Indonesia yang berdiri tepat di antara Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, dan juga berada di pertemuan tiga lempeng dunia yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Posisi ini yang menyebabkan Indonesia sering dilanda bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus serta berbagai bencana lain. (Badan Geologi, 2019 dalam Murdiaty, Angela, dan Sylvia, 2020:1)

Di dalam UU No. 24, 2007 dijelaskan bahwa bencana sendiri ialah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam atau non alam ataupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta dan dampak psikologis. Terdapat dua jenis bencana yang terjadi di masyarakat, yakni bencana alam dan bencana non alam atau sosial. Adapun macam-macam bencana alam yang sering terjadi di Indonesia yaitu Gempa Bumi, Banjir, Gunung Meletus, Erosi Tanah, dan Tsunami yang menyebabkan masyarakat Indonesia harus tanggap terhadap ancaman bencana. Namun sayangnya tingkat tanggap bencana di masyarakat terbilang rendah dan terikat pada kepercayaan baik mitos ataupun perkara-perkara dosa dari tuhan. Ini disebabkan oleh

masyarakat yang menganggap bahwa bencana ialah merupakan suatu takdir. Ini dijelaskan dalam data yang dilakukan oleh Bakornas hal itu merupakan gambaran bahwa paradigma konvensional masih kuat dan berakar di masyarakat. Pada umumnya mereka percaya bahwa bencana itu adalah suatu kutukan atas dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, sehingga tidak perlu lagi berusaha untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau penanggulangannya. (Bakornas PB Edisi II, 2007).

Pandangan semacam ini ditemukan saat peristiwa bencana alam Gempa Bumi dan Tsunami di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018 silam. Masyarakat setempat meyakini bahwa kejadian tersebut sebagai karma dari diadakannya festival yang diyakini sebagai perbuatan syirik atau menyekutukan tuhan, dan munculnya bencana alam tersebut sebagai bentuk azab atau balasan atas kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang mengakibatkan mereka kurang dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana alam yang terjadi. (BBC News Indonesia: 2018). Hal serupa juga pernah terjadi dalam peristiwa bencana alam Gunung Api Meletus, yaitu Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 tepatnya di bulan Oktober, yang saat itu memakan korban sebanyak 277 orang tewas termasuk juru kunci sekaligus tokoh masyarakat yaitu Mbah Maridjan, beliau yang percaya akan nasehat-nasehat nenek moyang dan mitos-mitos leluhur tentang Merapi dan yakin bahwa Merapi akan baik-baik saja, memutuskan untuk tidak ikut dievakuasi dan memilih tinggal dirumah, namun gumpalan awan panas yang warga sekitar sebut sebagai “wedos gembel” menewaskan Mbah Maridjan dalam keadaan sujud, selain itu banyaknya material muntahan lava panas dan reruntuhan bangunan juga menjadi faktor penyebabnya. (Liputan6:2019)

Pengalaman peristiwa bencana alam dan kondisi geologi di Indonesia tersebut seharusnya menjadi pelajaran, tanggung jawab dan sebagai pandangan baru untuk mitigasi bencana kepada masyarakat Indonesia yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar-dasar apa saja yang menjadi alasan masyarakat Indonesia lemah terhadap menghadapi ancaman bencana alam yang banyak terjadi di sekitar mereka.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Studi literatur ialah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (literature review), dan tinjauan teoritis. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Embun, 2012). Data-data yang diambil ialah data dari kajian pustaka sebelumnya yang mampu menjadi rujukan dan referensi peneliti dalam mengkaji tema dan judul yang dibahas dalam artikel ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kerentanan Bencana

Bencana menurut Kepmen No. 17/kep/Menko/Kesra/x/95 ialah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang berakibat timbulnya korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan rakyat. Pengertian bencana tersebut selaras dengan definisi bencana dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. WHO, 2002 (World Health Organization) menjelaskan bahwasanya bencana ialah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena dampak dari adanya bencana tersebut.

Kerentanan bencana baik alam ataupun sosial bagi Indonesia tergolong hal yang sangat penting untuk ditangani baik oleh pemerintah ataupun masyarakat secara bersama dan teroganisir, hal ini disebabkan oleh topografi, letak astronomi dan letak geografi Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana alam. Seperti yang diketahui bahwa posisi Indonesia terletak diantara patahan lempeng aktif dunia yang memberikan potensi besar untuk terjadinya bencana alam, peristiwa bencana alam yang sering terjadi seperti Gempa Bumi, Gunung Meletus, Tsunami, Erosi Tanah, dan juga Banjir.

Tingginya intensitas kerentanan bencana di Indonesia ini, juga disebabkan oleh sistem navigasi bencana yang kurang merata di tiap-tiap daerah, terlebih di daerah yang memiliki skala tinggi terjadinya bencana alam, seperti di kawasan pesisir pantai, pegunungan,

perbukitan, ataupun daerah aliran sungai yang banyak di manfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal mereka. Selain itu, penempatan alat-alat pendeteksi adanya bencana alam juga kurang merata dilakukan oleh instansi terkait yaitu BMKG, seperti dilansir dari berita online detiknews, BMKG yang diketuai oleh Dwikorita menyampaikan bahwa banyak temuan di lapangan mengenai alat pendeteksi bencana alam yang sudah disebar luaskan pemasangannya di daerah-daerah rawan bencana mengalami kerusakan, hilang, bahkan hilang dicuri oleh warga sekitar(detiknews:2020). Selain itu juga disebabkan oleh keadan masyarakat Indonesia yang masih minim tanggung jawab serta semangat dalam menangani isu-isu kerentanan bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia, yang menjadikan kerentanan bencana akan tergolong dalam penanganan yang cukup serius.

b. Masyarakat Indonesia

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang di kawasan Asia, dengan jumlah penduduk sekitar 270,20 juta jiwa. Dengan jumlah ragam bahasa sebanyak 652 bahasa daerah, 1.340 suku, 17.000 pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke dan 6 agama yang dianut oleh tiap penduduknya (Badan Pusat Statistik:2020). Menjadikan masyarakatnya beragam, dan memiliki ciri khas tersendiri dari tiap wilayah serta nilai toleransi yang tinggi akan sesama. Hal ini menjadi kekayaan tersendiri yang dimiliki bangsa Indonesia, dimana BhinekaTunggal Ika sebagai pedoman masyarakatnya untuk hidup rukun bersama walau berbeda.

Keragaman itu didasarkan karena perbedaan wilayah yang terdapat di Indonesia, perbedaan topografi menyebabkan masyarakatnya tumbuh dan besar dengan ciri khas yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan mereka, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, hingga terhadap ancaman bencana. Dibalik keberagaman tersebut masyarakat Indonesia, memiliki persamaan kondisi diantara mereka, yaitu mengenai ancaman bencana alam yang banyak terjadi di sekitar mereka. Masyarakat Indonesia yang terkenal akan berbagai macam budaya serta kepercayaannya terhadap sesuatu hal memiliki dampak positif dan negatifnya masing-masing, salah satu dampak positif terhadap kepercayaan akan nasehat-nasehat lama menjadikan masyarakat Indonesia yang tidak lupa budaya, adat istiadat, dan nilai leluhurnya. Namun dibalik itu, terdapat pula dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat,

yakni kurangnya menerima pendapat atau informasi yang lebih terbaru terhadap suatu keilmuan, dengan dalih itu menyalahi aturan nenek moyang, mitos, hukum adat, ataupun ajaran-ajaran agama yang telah mereka pelajari secara turun-temurun. Dampak negatif ini salah satunya dirasakan dalam bidang mitigasi bencana alam, tumbuhnya kepercayaan atau mitos ditengah-tengah masyarakat menjadikan mereka kurang dalam menerima informasi mengenai ancaman bencana alam dan mitigasinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya mitos-mitos yang tumbuh di masyarakat seperti contoh mitos yang terdapat di masyarakat pulau jawa, masyarakat meyakini adanya keberadaan Nyi Roro Kidul yang diibaratkan sebagai penguasa laut selatan, pelindung raja-raja jawa. Kepercayaan tersebut tercerminkan dalam kegiatan upacara Labuhan yang sering digelar di titik-titik tertentu seperti di Gunung Lawu, Gunung Merapi, dan Pantai Parangtritis dengan tujuan untuk memohon keselamatan kepada Nyi Roro Kidul tersebut (bbc news: 2019). Di Bali, masyarakatnya memiliki kepercayaan kepada makhluk mitologi bernama Bedawangnala dengan wujud berbentuk kura-kura raksasa yang berdiam di dasar bumi dan menjadi perlambang magma di bawah gunung berapi. Diceritakan bahwasanya Bedawangnala ini diikat oleh dua ekor naga yaitu Anantabhoga yang melambangkan tanah, dan Basuki yang melambangkan air. Jika Bedawangnala bergerak dan memicu erupsi gunung berapi, anantabhoga juga ikut bergerak pergerakan ananthaboga inilah yang dipercaya menyebabkan gempa bumi. Sedangkan apabila gerakan Bedawangnala semakin aktif, giliran Basuki yang terusik dan ikut bergerak dan menyebabkan Tsunami (liputan6: 2019).

Contoh dari banyaknya mitos yang berkembang di masyarakat mengenai anggapan bencana alam, membuktikan bahwasanya hal tersebut menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat Indonesia lemah terhadap menghadapi ancaman bencana.

c. Faktor Dari Pemerintah

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan, kekuasaan dan andil besar pada tiap keputusan serta penyelenggaraan keputusan yang telah ditetapkan demi kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyatnya sudah semestinya turut andil dalam sistem kebencanaan yang ada. Hal ini sama dengan keputusan pemerintah yang terdapat dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015–2019 yaitu tentang cara penanggulangan bencana yang terpusatkan pada tiga hal, yakni:

- 1) Pemusatan pengurangan risiko bencana dalam struktur pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah
- 2) Penurunan tahap kerentanan terhadap bencana, dan
- 3) Peningkatan daya tampung dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan data evaluasi paruh waktu yang terdapat dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang dikutip dari Kementerian PPN Bappenas, pada tahun 2017 memperkirakan bahwasanya untuk mencapai fokus nasional tentang mitigasi bencana yang masih membutuhkan kerja keras telebih untuk 135 kabupaten atau kota yang masih menjadi fokus utama dalam penurunan indeks rawan bencana Indonesia (IRBI) dari berbagai kelompok baik dari peran Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sendiri. Mitigasi bencana yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mengenai mitigasi bencana dirasa masih memiliki kelemahan dan kekurangan, yang diantaranya yaitu:

- a) Tidak adanya peraturan turunan Undang-Undang Mitigasi bencana.

Regulasi mengenai Undang-Undang Mitigasi bencana belum dapat terwujud secara keseluruhan, sebab belum adanya Peraturan resmi presiden mengenai Kedudukan dan Tingkatan Bencana sebagaimana diatur dalam pasal 1, pasal 7, dan pasal 57 Undang-Undang mitigasi bencana. Hal ini menjadi penting sebab polemik mengenai status serta tingkatan mengenai tahapan bencana masih belum sanggup dituntaskan dan diatur dalam sebuah Peraturan resmi Presiden. Di sisi lain masih terdapat juga kebijakan-kebijakan yang masih dalam tahap pemrosesan tentang kajian resiko bencana dan standard perbaikan minimum dan semacamnya.

- b) Kurang Maksimalnya Bantuan Subsidi

Dijelaskan dalam peraturan pemerintah pada No. 22 Pasal 4 ayat 2 pada Tahun 2008 menyatakan bahwasanya sumber subsidi untuk kasus mitigasi bencana didapatkan dari APB dan APBN ataupun subsidi masyarakat yang didapatkan dari Individu ataupun yayasan. Dana APBN biasanya berbentuk dana kontigensi, dana siap pakai, dan subsidi rutin untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun sayangnya dari tahun 2015 tercatat bahwasanya anggaran mengenai penanggulangan bencana pada

BNPB terus mengalami kemerosotan, penurunan ini berakibat pada tindakan kesiapsagaan untuk mengatasi bencana, menyiapkan kebutuha logistik untuk daerah yang rawan terhadap bencana, pemulihan atau rekontruksi dalam aspek sosial dan ekonomi pada daerah selepas bencana, tanggap darurat di kawasan terdampak bencana serta mempersiapkan masyarakat dalam kesiapan pada tiap kawasan.

c) Lambatnya Mekanisme Proses Dana Penanggulangan Bencana

Keterbatasan mengenai prosedur pemrosesan dana penanggulangan bencana akan berdampak pada kecepatan reaksi pemerintah terhadap penanggulangan berupa perbaikan dan pembangunan ulang insfrastruktur yang rusak akibat bencana yang terjadi. Yang juga berakibat pada kondisi masyarakat yang lambat dalam memperoleh penanangan lanjut untuk keselamatan mereka, terlebih dalam keadaan darurat.

d) Lamanya Upaya Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana.

Keadaan masyarakat yang tergolong minim akan ancaman bencana alam yang dipengaruhi oleh kurangnya mitigasi pada bencana seperti prosedur himbauan awal sampai kebiasaan mitigasi yang tergolong kurang mencapai keseluruhan kelompok sosial terlebih untuk masyarakat rawan bencana alam, seperti di pesisir pantai, daerah lereng gunung, perbukitan ataupun di daerah aliran sungai. Hal ini juga ditemukan bahkan di lingkungan aparaturnya Pemerintahan. Ini menjadi indikator bahwa pemerintah masih kurang dalam upaya penanggulangan bencana ini, baik dari pembangunan fisik ataupun penyadaran terhadap masyarakat melalui sosialisasi secara intens yang menyebabkan belum tertanamnya informasi mengenai pentingnya kebencanaan. Ini seharusnya menjadi hal penting yang harus cepat ditangani oleh pemerintah sebab Indonesia sendiri berada dalam daerah rawan bencana.

e) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait

Hal ini terlihat jelas dalam sistem pendanaan terkait dana bencana alam, antar instansi terkadang dalam regulasinya tidak berbarengan dan mengakibatkan keterlambatan dalam upaya pemberian bantuan baik dana ataupun tenaga pada korban terdampak bencana. Hal ini juga tergambar pada kegiatan pengumpulan dana yang biasanya banyak dilakukan setelah adanya kabar bahwa telah terjadi bencana alam di suatu daerah, hasil dari

penggalangan dana tersebut banyak ditemui penyelewangan dari oknum –oknum tertentu dengan atas instansi resmi seperti Kementerian Sosial ataupun lembaga lainnya, yang berakibat merugikan orang lain dan tidak sampainya bantuan tersebut kepada korban terdampak. (Martha, buletin APBN: 2018)

d. Paradigma tentang kebencanaan

Perkembangan dan pergeseran paradigma dalam masyarakat terhadap suatu hal terus terjadi, sesuai dengan kondisi dan perubahan zaman yang ada. Pergeseran tersebut juga terjadi pada penanggulangan terhadap bencana alam yang terjadi di masyarakat. adapun empat hal yang fundamental yang mengalami pergeseran paradigma, yaitu:

a) Dari tanggap darurat menjadi kesiapsagaan

Menyiapkan masyarakat yang jauh lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam menghadapi adanya ancaman bencana alam, membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif agar tahan dan tangguh ketika bencana menimpa mereka. Maka dari itu penting sekali sikap tanggap darurat dibutuhkan dan dilakukan oleh masyarakat yang dalam menghadapi bencana alam yang mereka hadapi. Dan di sisi lain pentingnya keseluruhan manajemen resiko dan pembangunan juga di bangun secara terstruktur.

b) Dari sentralistik menjadi otonomi daerah

Peristiwa bencana alam sudah seharusnya direspon dengan cepat dan tepat. Namun penanganan yang selama ini sering terjadi yaitu banyaknya keterlambatan bantuan baik dari bantuan fisik ataupun bantuan pokok yang dibutuhkan masyarakat terdampak, hal ini disebabkan mengenai penanganan bencana alam banyak di urus oleh pemerintah pusat. Maka dari itu penanganan bencana alam juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai daerah yang memiliki kekuasaan yang mandiri.

c) Bersumber pemerintah sentris menjadi partisipasi

Masalah pendanaan terkait peristiwa bencana alam menjadi salah satu hal yang cukup serius bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Masalah pendanaan yang tidak hanya terfokus pada satu peristiwa saja menjadikan hal tersebut juga harus mampu ditangani dengan baik selain oleh pemerintah pusat. Peran masyarakat, instansi,

nasional bahkan internasional juga sangat dibutuhkan dalam membantu memulihkan korban dan keadaan pascabencana tersebut. Pergeseran ini disebabkan karena terdapat demokratisasi dan kekuasaan daerah sebagai penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab pemerintah bersama dengan rakyat.

d) Dari kedermawanan menjadi kewajiban dan hak yang harus dipenuhi

Anggapan awal mengenai membantu korban bencana alam sebagai bentuk kemurahan hati yang didasarkan oleh empati dan simpati yang dilakukan pemerintah. Pada nyatanya, anggapan ini salah besar. Sebab penanggulangan pada korban bencana alam bukan hanya dikarenakan kemurahan hati pemerintah atau badan terkait, namun memang menjadi dasar tanggung jawab serta hak yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh korban terdampak. Dari anggapan anggapan semacam inilah yang juga akhirnya membentuk masyarakat yang lemah dalam menghadapi ancaman bencana, sebab persepsi tidak menjadi fokus utama pemerintah menjadikan masyarakat merasa tidak perlu khawatir pula terhadap ancaman bencana alam yang akan datang. (Dwi Anita Sari: 2017)

e. **Faktor tingkat literasi dan anggapan bahwa bencana ialah peristiwa yang menarik dan kebiasaan masyarakat dalam mendokumentasi bencana alam**

Survey yang dilakukan oleh badan penguji literasi yakni *Program for Assessment (PISA)* yang diliris oleh *Organization for Economic coperration and development (OECD)* pada tahun 2019 menyampaikan bahwasanya tingkat literasi masyarakat Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara yang ter uji. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, yaitu adanya pernyataan yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia berada di sisi hilir, sisi hilir ini bermakna bahwa kondisi masyarakat kita yang terus menjustifikasi sebagai masyarakat yang rendah dalam budaya membaca. Stigma yang banyak berkembang itu lah yang menjadikan rendahnya daya saing, rendahnya inovasi, rendahnya gizi, dan rendahnya indeks pembangunan pada sumber daya manusinya. Selain faktor tingkat literasi, baru-baru ini fenomena dalam penggunaan dan pemanfaatan media sosial dalam masyarakat tergolong tinggi. Hampir semua aktifitas atau peristiwa di sekitar mereka akan di dokumentasikan baik secara gambar ataupun video yang akhirnya akan mereka bagikan melalui akun media sosial mereka, dengan harapan akan mendatangkan banyak pengikut untuk akun tersebut. Terlebih bagi kaum millennial saat ini, yang hampir semua aktifitasnya dipenuhi dengan penggunaan

media sosial, dalam kasus peristiwa bencana alam, banyak sekali contoh kasus yang menggambarkan bagaimana besar ambisi masyarakat dalam penggunaan media sosial untuk kepentingan mereka, salah satunya dalam mendokumentasi peristiwa bencana-bencana alam yang terjadi di sekitar mereka, dan tak banyak pula yang berujung memakan korban jiwa dari kegiatan tersebut. kedua hal inilah yang juga berpengaruh besar terhadap proses penanggulangan terhadap ancaman bencana yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat secara disiplin dan terorganisir, maka dari itu tingkat literasi juga menjadi alasan mengapa masyarakat Indonesia lemah dalam menghadapi ancaman bencana yang mengintai kehidupan kita, serta penggunaan media sosial dan ambisi terhadap pendokumentasian suatu peristiwa juga turut ambil posisi dalam lemahnya masyarakat Indonesia menghadapi ancaman bencana. Banyaknya faktor yang juga menjadi penyebab masyarakat Indonesia lemah dalam menghadapi ancaman bencana yang dilakukan baik oleh pemerintah, instansi ataupun hal lain yang terkait harus cepat ditangani agar tidak berlalu dan akan menimbulkan dampak yang jauh lebih besar lagi yang tentunya akan merugikan banyak pihak terlebih Pemerintah sebagai badan penanggung jawab serta masyarakat terdampak.

4. KESIMPULAN

Banyak sekali faktor, penyebab ataupun alasan yang menjawab mengapa masyarakat Indonesia lemah dalam menghadapi ancaman bencana. Seperti yang sudah dijelaskan faktor fundamental terdapat dalam diri masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat masih banyak yang memegang teguh budaya leluhur nenek moyang dan cenderung tidak mau menerima informasi baru terlebih mengani ancaman bencana alam dan penanggulangannya yang jauh lebih modern dan lebih efisien. Banyak contoh kasus yang menceritakan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana lewat kepercayaan ataupun mitos budaya yang sudah turun-temurun mereka dapatkan dan mereka yakini kebenaran dan keberadaannya. Yang berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap adanya ancaman bencana di sekitar mereka, sebab hampir semua wilayah di Indonesia tergolong dalam wilayah yang rawan bencana, maka dari itu penting sekali kesadaran masyarakat terhadap hal tersebut agar tidak mengakibatkan banyaknya korban jiwa ataupun harta jika bencana alam itu terjadi. Selain dari masyarakatnya yang masih minim akan akan informasi

dan tanggung jawab terhadap ancaman bencana, faktor lain seperti adanya pergeseran paradigma terhadap penanggulangan bencana juga turut andil dalam analisa ini, dari pemerintah juga turut andil dalam hal ini, masih banyak ditemukan kurangnya pemaksimalan usaha pemerintah dalam menanggulangi ancaman bencana di masyarakat, yang berakibat pada lemahnya masyarakat terhadap menghadapi ancaman bencana yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Murdiaty, Angela, dan Sylvia, C. (2020). Pengelompokan Data Bencana Alam Berdasarkan Wilayah, Waktu, Jumlah Korban dan Kerusakan Fasilitas Dengan Algoritma K-Means. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, Vol, 4, No. 4, hlm. 744-752. <https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib/article/view/2213/0>
- Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007
- Pelaksana Harian Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. (2007). **PENGENALAN KARATERISTIK BENCANA DAN UPAYA MITIGASINYA DI INDONESIA**. Jakarta: Direktorat Mitigasi.
- Affan, Heyder. (2018). Gempa Palu: Antara “Hukuman Tuhan” dan penjelasan ilmu pengetahuan. BBC News Indonesia, [https://www.bbc.com/indonesia/i...Gempa Palu: Antara 'hukuman Tuhan' dan penjelasan ilmu ... – BBC](https://www.bbc.com/indonesia/i...Gempa_Palu:_Antara_'hukuman_Tuhan'_dan_penjelasan_ilmu...-BBC)
- Linawati, Mevi. (2019). Dahsyatnya Letusan Gunung Merapi 5 November 2010. Liputan 6, [https://m.liputan6.com/.../Peristiwa Dahsyatnya Letusan Gunung Merapi 5 November 2010 - News Liputan6.com](https://m.liputan6.com/.../Peristiwa_Dahsyatnya_Letusan_Gunung_Merapi_5_November_2010_-_News_Liputan6.com)
- Amin, A. Rifqi. (2012). **PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH)**. Banjir Embun. <http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-kepuustakaan.html>
- Kepmen Nomor 17/kep/Menko/Kesra/x/95. Pengertian Bencana
- Azmi, Faiq. (2020). BMKG Tambah 4 Alat Pendeteksi Bencana di Jatim: Jangan Dicuri!. Detiknews, [https://news detik.com/berita-jawa-timur/d-4912761/bmkg-tambah-4-alat-pendeteks-bencana-di-jatim-jangan-dicuri](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4912761/bmkg-tambah-4-alat-pendeteks-bencana-di-jatim-jangan-dicuri)
- Badan Pusat Statistik. (2021). Berita Resmi Statistik Hasil Sensus Penduduk 2020. Kementerian Dalam Negeri, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Yulianto, Eko. (2019). Nyi Roro Kidul: Antisipasi bencana alam lewat kearifan lokal. BBC News Indonesia, <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/media-50099670.amp>
- Riani, Asnida. (2019). Menyimak Mitos dan Kisah Legenda tentang Gempa dari Berbagai Negara. Liputan 6, <https://m.liputan6.com/lifestyle/read/4028885/menyimak-mitos-dan-kisah-legenda-tentang-gempa-dari-berbagai-negara>
- Carolina, Martha. (2018). Kelemahan-Kelemahan Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia. *Buletin APBN Vol. III Edisi 18*. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-67.pdf>
- Sari, Dwi Anita. (2017). **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA RAHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR DI**

KABUPATEN SAMPANG (Studi Kasus di BPBD Kabupaten Sampang). *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang. <http://eprints.umm.ac.id/35917/>*
Utami, Larasati Dyah. (2021). Tingkat Literasi Indonesia di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara. Perpustakaan Kemendagri. <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/?p=4661>